

BAB IV

KONDISI EMPIRIK DARI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibagian selatan dibatasi lautan indonesia, sedangkan dibagian timur timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi wilsayah provinsi jawa tengah yang meliputi:

- a. Kabupaten Klaten disebelah Timur Laut.
- b. Kabupaten Wonogiri disebelah Tenggara.
- c. Kabupaten Purworejo disebelah Barat.
- d. Kabupaten Magelang disebelah Barat Laut.

Berdasarkan satuan fisiografis Daerah Isitimewa Yogyakarta terdiri dari

- a. Pegunungan Selatan dengan laut $\pm 1.656.25 \text{ km}^2$ dengan ketinggian 150-700m.
- b. Gunung Berapi merapi dengan luas $\pm 582.81 \text{ km}^2$ dengan ketinggian:80-2.911m.
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegungan Kulonprogo dengan luas $\pm 1.215.62 \text{ km}^2$ dengan ketinggian : 0-80m.
- d. Pegunungan kulonprogo dan Dataran rendah selatan dengan luas : $\pm 706.25 \text{ km}^2$ dengan ketinggian : 0-572m.

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 % dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Merupakan provinsi terkecil setelah provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari

- a. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,72 km² (18,40%).
- b. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%).
- c. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%)
- d. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%)
- e. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%)

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional dari 3.185,80 km² luas D.I. Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 % Regosol, 12,38% Lathosol, 10,97 %, Grumusol, 10,84% Mediterm, 3,19% Alluvial dan 2,47 % adalah tanah jenis Rensina.

2. Kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara Administratif

Secara administratif, DIY menjadi wilayah otonom yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang kedudukan hukum DIY. Berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. kewenang dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Wilayah administrasi DIY terbagi menjadi % kabupaten/kota tersebut meliputi kabupaten Kulonprogo, Bantul,

Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat penyelenggaraan Pemerintah pada tingkat provinsi berada di Kota Yogyakarta (BPS DIY, 2017).

3. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 4. 1
Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Kondisi Empirik

1. Kondisi Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di tetapkan pada tingkat yang selalu konsen secara rill sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang di peroleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Tabel 4. 1
Presentase Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah (%)
2011	9,62
2012	9,38
2013	8,82
2014	8,67
2015	8,75
2016	7,70
2017	7,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat dilihat persentase persebaran penduduk miskin di Kota Yogya tergolong cukup tinggi dikarenakan hamper mencapai 10 persen. Hal ini ditunjukkan oleh data persentase kemiskinan pada tabel 4.1 di tahun 2011 dan 2012. Peningkatan kemiskinan di alami pada tahun 2014 dari awalnya hanya berkisar 8 persen, menjadi hamper 9 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dari tahun 2011 sampai tahun 2017 menunjukkan adanya program pembangunan yang dijalankan telah berhasil. Penurunan tingkat kemiskinan ini di duga terjadi karena peningkatan PDRB di provinsi DIY.

2. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 4. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2017 (dalam persen).

Tahun	Jumlah (%)
2011	5,84
2012	5,40
2013	5,47
2014	5,28
2015	5,09
2016	5,11
2017	5,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut adalah sector-sektor yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan sector tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbilang cukup besar.

3. Kondisi Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia, tanpa manusia pendidikan tidak pernah ada, *human life is just matter of education* (Suparlan, 2008). Keberadaan kegiatan mendidik tersebut tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus dimensi tempat,

dalam arti pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundamental, universal, dan fenomenal.

Fundamental pendidikan ini dapat ditentukan dari kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrument utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sebagai bangsa. Tanpa melalui pendidikan seorang anak tidak akan bisa menjadi sosok manusia utuh (*a fully functioning person*). Universal pendidikan dapat dilihat dari proses hiruk pikuk pendidikan yang telah dilakukan umat manusia dalam dimensi waktu maupun tempat. Pada waktu kapanpun dan dimanapun pendidikan selalu saja diselenggarakan.

Tabel 4. 3
Pendidikan Kota Yogyakarta Menurut Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah (%)
2011	11,01
2012	11,22
2013	11,36
2014	11,39
2015	11,41
2016	11,42
2017	11,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

4. Kondisi Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2035 jumlah penduduk DIY tahun 2016 tercatat 3.720.912 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,45 persen dan penduduk perempuan 50,55 persen. Pertumbuhan

penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai 1,18 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1.13 persen (BPS DIY, 2017). Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.168 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.854 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayahterluas mencapai 46,63% persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang diburu rata-rata 486 jiwa per km² (BPS DIY, 2017).

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota (dalam juta jiwa) di Provinsi
DIY Tahun 2011-2017

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2010	389.661	909.539	677.376	1.103.534	387.379
2011	394.200	922.104	685.003	1.116.184	392.506
2012	398.672	934.674	692.579	1.128.943	397.594
2013	403.179	947.072	700.191	1.141.733	402.679
2014	407.709	959.445	707.794	1.154.501	407.667
2015	412.198	971.511	715.282	1.167.481	412.704
2016	416.683	983.527	722.479	1.180.479	416.683
2017	421.295	995.264	729.364	1.193.512	422.732

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2017

Dilihat dari Tabel 4.3 diatas, jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi DIY mengalami Peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kualitas penduduk tersebut. Jumlah terbanyak di Provinsi DIY berada pada Kabupaten Sleman yaitu dengan jumlah 1.193.512 jiwa pada tahun 2017.

Menurut angka Proyeksi Penduduk 2010-2035, komposisi penduduk D.I. Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebesar 8,46 persen. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 28,88 persen. Kelompok umur 25-29 tahun 49,32 persen dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun keatas sebesar 13,58 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk D.I. Yogyakarta yang mencapai 74,71 (BPS DIY, 2017).

5. Kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Upah Minimum yaitu standar minimum yang digunakan oleh para usaha/perusahaan untuk memberikan upah kepada pekerja yang bersifat rutin setiap minggu atau bulan walaupun tidak masuk kerja tetapi gaji atau upah akan tetap masuk.

Tabel 4. 5
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017

Tahun	Provinsi				
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2010	751.000	756.000	746.000	761.000	766.000
2011	815.000	822.000	808.000	829.000	836.000
2012	897.000	902.000	893.000	906.000	911.000
2013	954.339	993.484	947.114	1.026.181	1.065.247
2014	1.069.000	1.125.500	988.500	1.127.000	1.173.300
2015	1.138.000	1.163.800	1.108.249	1.200.000	1.302.500
2016	1.268.870	1.297.700	1.235.700	1.338.000	1.452.400
2017	1.373.600	1.404.760	1.337.650	1.448.385	1.572.200

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukan Upah Minimum tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.572.200 pada tahun 2017 dan peningkatan Upah Minimum ini berdampak positif untuk masyarakat agar lebih termotivasi dan semakin giat untuk bekerja. Meningkatkan tingkat konsumsi domestik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.